

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti akan memamparkan analisis pembahasan dari penelitian yang dilakukan mengenai penelitian analisis kualitas kebijakan : Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Dalam analisis kualitas kebijakan menurut Ulber Silalahi memiliki empat dimensi untuk diantaranya transparansi, partisipasi, akuntabel dan responsif

#### **5.1. Transparansi**

Dalam nilai transparansi melihat pada bagaimana informasi dapat diakses tanpa batas oleh publik yang tepat dan akurat pada kinerja di sektor publik. Penyebaran informasi dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat mengetahui informasi terkait keputusan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Transparansi publik merupakan prinsip yang memberikan kebebasan kepada masyarakat dapat mengetahui informasi terkait penyelenggaraan serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Kegunaan dari melihat nilai transparansi pada proses pembentukan kebijakan publik khususnya pada tahap formulasi akan menunjukkan kualitas kebijakan apakah pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 pemerintah daerah setempat telah mengutamakan nilai transparansi kepada publik dengan menerapkan prinsip kebijakan publik yang demokratis atau bahkan sebaliknya. Pada penelitian ini kebijakan yang dipilih oleh peneliti adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung, melalui analisa yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa dalam formulasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung telah mengakomodasi nilai transparansi

pada proses pembentukan kebijakan daerah yang memberikan penilaian bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2022 dinilai berkualitas dalam nilai transparansi.

Berdasarkan analisis oleh peneliti terkait transparansi pada formulasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan gedung keterbukaan ditunjukkan pada awal mula ide adanya perubahan peraturan yang mengatur mendirikan bangunan gedung. Adanya perencanaan terkait rancangan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 diawali dengan pembahasan terkait lanjutan peraturan daerah berkenaan izin mendirikan bangunan, dalam pembahasan dewan bersama perangkat daerah sedang melakukan revisi kebijakan izin mendirikan bangunan dikarenakan dalam proses pelaksanaannya khususnya pada regulasi sudah tidak sesuai dengan tata pelaksanaan, seiring dengan pembahasan terkait revisi izin mendirikan gedung secara berkala pada tahun 2020, terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang berkaitan dengan penghapusan kebijakan izin mendirikan gedung.

Dalam maksud terbitnya Undang-undang cipta kerja yang menghapuskan kebijakan izin mendirikan bangunan, maka pemerintah pusat memberikan gagasan bahwa diperlukannya pembaharuan terkait regulasi mendirikan bangunan yang direncanakan dapat diterapkan pada tahun 2023. Melalui pembahasan rapat bersama pemerintah pusat, pada setiap pemerintah daerah diharuskan membuat regulasi terbatu yang berkaitan dengan mendirikan bangunan. Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dengan menanggapi usulan pemerintah pusat, pemerintah daerah Purwakarta mengambil inisiasi untuk membuat perencanaan terkait penyusunan peraturan baru yang mengatur bangunan gedung yang mengubah kebijakan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan.

Dalam proses perencanaan peraturan terkait perubahan izin mendirikan bangunan, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta menjadi wilayah pertama yang mampu memenuhi mandat dari pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan peraturan daerah Nomor 1 Tahun

2022 tentang retribusi persetujuan bangun gedung. Dalam pembahasan perancangan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 pada pertemuan dewan dengan perangkat dinas terkait, membentuk panitia khusus untuk dapat terselenggarakan rancangan Perda Nomor 1 Tahun 2022 dengan mengatur perangkat daerah terkait untuk diberikan tugas sesuai dengan masing masing bidang setiap dinas. Dalam proses penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2022 dinas PUTR yang memiliki keterkaitan terkait Perda yang akan diformulasikan dikarenakan pada materi kebijakan berkenaan dengan fungsi bangunan, koefiensi bangunan.

Pada muatan materi pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan gedung mengacu pada kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, namun dalam substansi materi nya terdapat perbedaan mengenai koefiensi bangunan terkait besaran biaya yang akan dilunaskan pada persetujuan bangunan gedung. Adanya pertimbangan pengecualian retribusi persetujuan bangunan gedung yaitu bangunan keperluan sosial, keagamaan yang dibebaskan pada proses retribusi dalam membangun bangunan tersebut. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 dibentuk untuk mewujudkan penertiban penyelenggaraan bangunan agar sesuai dengan ketentuan. Perumusan retribusi wajib perlu diikuti setiap pemohon untuk melakukan perubahan bangunan, perluasan bangunan dengan mengikuti standar teknis bangunan gedung. Maka dapat dianalisa bahwa terkait transparansi perubahan peraturan retribusi persetujuan bangunan gedung yang mengubah izin mendirikan bangunan didasari dengan terbitnya Undang-Undang cipta kerja yang harus menghapuskan peraturan izin mendirikan bangunan.

Dengan adanya perubahan kebijakan yang mengatur Pembangunan gedung, maka perlu dilihat bagaimana pemerintah dapat menerapkan nilai transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat luas untuk dapat mengetahui bahwa adanya perubahan yang mengatur besaran retribusi bangunan gedung. Berdasarkan analisis peneliti yang telah melakukan wawancara terkait kualitas kebijakan dalam formulasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022

dapat dilihat pada pemerintah memberikan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait adanya perubahan kebijakan daerah. Dalam mengatur penyebaran informasi Dinas perangkat daerah yang memiliki tugas serta tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa adanya perubahan kebijakan terkait retribusi persetujuan bangun gedung.

Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta seiring dengan proses penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2022, melakukan program terkait pemberian informasi kepada masyarakat luas melalui pemberian informasi dengan mendatangi langsung ke beberapa desa yang dilakukan secara *focus group discussion* untuk memberikan sosialisai kepada kepa daerah dan masyarakat setempat terkait pemahaman atau edukasi hal-hal yang akan dimuat dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan gedung. Pemerintah daerah terkait telah melakukan penyebaran informasi terkait perubahan kebijakan daerah melalui penyiaran radio yaitu Pro radio Purwakarta 93,10 FM yang telah bekerja sama dengan pemerintah dan dianungi oleh dinas Diskominfo. Dalam penyebaran informasi terkait perubahan kebijakan dilanjut dengan adanya kegiatan talkshow yang dihadiri oleh pejabat birokrasi dinas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat adanya perubahan.

Adapun program yang dilaksanakan setiap tahun dengan mengelaborasi setiap perangkat daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendatangi wilayah yang dipilih, kegiatan ini dimaksudkan untuk adanya interaksi masyarakat dapat mengetahui tindakan atau kinerja pemerintah yang telah dilaksanakan dan menjadi wadah komunikasi pemberian informasi. Pemerintah daerah telah mengundang keterwakilan masyarakat atau sasaran target dalam muatan kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2022 dalam pembahasan rapat bersama perangkat dinas terkait dengan memberikan edukasi khususnya pada perubahan nilai koefiensi bangunan.

## **5.2. Partispasi**

Dalam nilai partisipasi melihat pada bagaimana pemerintah dapat melibatkan peran masyarakat secara langsung dalam kegiatan pengambilan keputusan. Partisipasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam semua proses dan tahapan keputusan dalam pembuatan kebijakan. Melihat persepektif dan preferensi masyarakat merupakan penting untuk dapat diterapkan dengan tujuan pihak pemerintah dapat mengetahui respon atau sudut pandang masyarakat terkait kebijakan yang akan diformulasikan dan mampu memenuhi keinginan warga dengan dasar demokrasi bukan untuk kepentingan kelompok.

Dengan melihat nilai partisipasi yang memiliki prinsip adanya keterlibatan masyarakat dalam formulasi kebijakan publik akan terlihat kualitas kebijakan dinilai unggul, hal ini dikarenakan nilai partisipasi merupakan salah satu nilai yang paling penting pada proses pembentukan suatu peraturan dikarenakan masyarakat adalah instrumen utama bagi pemerintah daerah dengan menjawab permasalahan yang ada dari hasil preferensi masyarakat. Melalui penelitian ini dalam formulasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung peneliti melihat bahwa kebijakan daerah telah mengakomodasi nilai partisipasi yang memberikan dampak Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 dinilai sebagai kebijakan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara serta temuan yang dilakukan peneliti nilai partisipasi dalam formulasi Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung ditunjukkan dengan, dalam formulasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung nilai partisipasi masyarakat merupakan pembahasan tingkat I yaitu berkenaan proses awal mulai dengan melakukan survey, kajian awal dan pembahasan rancangan Perda bersama pihak DPRD yang sudah dibentuk menjadi panitia khusus dan perangkat Dinas terkait. Adapun partisipasi dibedakan menjadi dua kegiatan yaitu keterlibatan masyarakat dengan mengumpulkan informasi terkait perubahan peraturan izin mendirikan gedung menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung dan keterlibatan masyarakat dalam

proses formulasi kebijakan. Bahwa dalam proses mengkaji rancangan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung masyarakat dilibatkan oleh pemerintah dalam memberikan edukasi terkait perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 digantikan Perda Nomor 1 Tahun 2022. Peran pemerintah dalam melibatkan masyarakat dilakukan mulai dari sosialisasi, kegiatan penyiaran radio, kegiatan sosialisasi talkshow dan program gempungan yang dapat dilihat bahwa adanya nilai partisipasi dengan memperlihatkan adanya interaksi baik pemerintah dan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung telah dipenuhi dengan pemerintah telah mengundang perwakilan masyarakat yang memiliki keterkaitan atau sebagai sasaran utama yang ditunjukkan dengan materi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Dalam keterlibatannya keterwakilan masyarakat dengan mengikuti rapat secara berkala bersama dinas perangkat daerah dan panitia khusus. Adapun maksud dari keterwakilan masyarakat yang diundang adalah pihak pelaku usaha seperti UMKM dan beberapa perusahaan properti yang memiliki kaitan dengan besaran retribusi bangunan gedung.

Dalam penyampaian pada rapat pembahasan rancangan Perda bersama perwakilan masyarakat, respon dan interaksi dalam rapat bersama Dinas organisasi perangkat daerah dan panitia khusus menunjukkan sebagian berjalan dengan baik tanpa adanya argumentasi menolak khususnya pada pihak dari beberapa perusahaan dikarenakan dalam pelaksanaan pemungutan biaya, besaran tarif retribusi persetujuan gedung mengikuti aturan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dan perwakilan dari setiap perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur dikarenakan untuk kebutuhan proyek agar berjalan sesuai dengan tujuan masing-masing proyek perusahaan tersebut. Namun sebagian masyarakat ada yang memberikan respon terkesan keberatan dikarenakan dalam beberapa tata pelaksanaannya harus mengikuti prosedur yang

berlaku termasuk penggunaan jasa konstruksi, keluhan biaya retribusi dan proses pelaksanaan dilakukan secara digital.

Berkaitan dengan Dinas PUTR menjelaskan bahwa adanya perubahan koefisien pada Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan gedung namun tidak akan menambah beban untuk masyarakat luas dikarenakan dengan adanya perubahan Perda izin mendirikan gedung menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung akan meringankan masyarakat untuk kalangan menengah ke bawah. Melalui hasil wawancara bersama pihak DPRD berkaitan dengan masukan atau kritik dari masyarakat, panitia khusus dan Dinas organisasi perangkat daerah akan melakukan pencatatan sesuai dengan preferensi masyarakat dengan melihat urgensi kepentingan masyarakat yang akan didahului untuk dipertimbangkan dalam muatan penulisan Perda per pasal khususnya dalam besaran biaya retribusi.

Adapun pembahasan tingkat II dalam formulasi Perda Nomor 1 Tahun 2022 partisipasi masyarakat dihadiri oleh keterwakilan masyarakat yang mewakili kepentingan warga yaitu DPRD gabungan dan Pemerintah Daerah. Dalam pembahasan rapat paripurna tingkatan II akan membahas terkait laporan panitia khusus terkait pencatatan keinginan dan preferensi masyarakat yang kemudian setiap fraksi akan diminta pendapat apakah menyetujui atau tidak, kemudian apabila telah disetujui oleh setiap fraksi kemudian hasil akhir akan disahkan oleh Bupati dalam rapat paripurna bersama dewan gabungan.

### **5.3 Responsivitas**

Responsivitas menjelaskan pada seberapa jauh pemerintah dapat memuaskan kebutuhan masyarakat guna menanggapi preferensi masyarakat. Bagaimana peran pemerintah dapat cepat dan tanggap kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan warga dengan melihat pandangan publik dalam formulasi kebijakan publik. Nilai responsivitas merupakan salah satu nilai-nilai demokrasi yang penting khususnya pada kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dalam

setiap keputusan pada pembentukan kebijakan publik. Dalam menganalisis suatu formulasi peraturan perlu melihat bagaimana pemerintah dapat menampung keinginan warga dalam suatu keputusan, hal ini penting dikarenakan dalam suatu keputusan perlu dihadiri preferensi dari perspektif masyarakat yang akan dimuat dalam suatu kebijakan.

Dengan menunjukkan nilai responsivitas pemerintah yang tanggap pada keinginan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan publik pada tahap formulasi akan memberikan pandangan bahwa suatu kebijakan yang telah dirancang dinilai berkualitas dikarenakan telah mengakomodasi nilai-nilai demokrasi salah satunya nilai responsivitas. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung peneliti melihat bahwa kebijakan daerah ini dinilai berkualitas karena pemerintah telah mengakomodasi nilai responsivitas dengan merangkum preferensi masyarakat yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yaitu terkait besaran retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara serta temuan oleh peneliti, nilai responsivitas pemerintah dapat ditunjukkan pada pemerintah daerah telah mengundang keterlibatan masyarakat untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terkait pembahasan perubahan Peraturan Daerah retribusi persetujuan gedung menggantikan Peraturan Daerah izin mendirikan bangunan. Dalam pertemuan bersama anggota panitia khusus, Dinas terkait dan masyarakat dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung melalui hasil wawancara menunjukkan sebagian masyarakat yaitu perwakilan masing masing dari badan usaha memberikan respon positif dan aktif dalam penyampaian argumentasi dalam penulisan pasal terkait besaran retribusi persetujuan bangunan gedung, hal ini dikarenakan pihak perusahaan mampu mengikuti besaran retribusi yang telah disepakati oleh pihak Dinas terkait.



Adapun interaksi masyarakat dalam memberikan tanggapan terkait penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan sebagian masyarakat menunjukkan adanya respon keberatan khususnya pada proses pelaksanaan yang dilakukan secara digitalisasi dimana masyarakat merasa terbebani pada proses pengumpulan berkas, masyarakat merasa terbebani pada besaran retribusi yang akan dirumuskan oleh Dinas PUTR, dan masyarakat merasa terbebani dalam membangun bangunan harus menyediakan penyedia jasa konsultan bangunan.

Menanggapi keresahan sebagian masyarakat responsivitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ditunjukkan dengan, pemberian edukasi kepada sebagian masyarakat yang merasakan keluhan terkait besaran retribusi telah diformulasikan sesuai dengan luas bangunan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah 16 Nomor 2021 dan memberikan pemahaman bahwa besaran retribusi persetujuan bangunan gedung lebih rendah dibandingkan dengan besaran tarif pada Peraturan Daerah izin mendirikan bangunan. Berkenaan tentang proses tata pelaksanaan retribusi persetujuan bangunan gedung dilakukan secara digitalisasi pemerintah memberikan respon bahwa kesepakatan telah diputuskan karena mengedepankan nilai integritas serta meminimalisir adanya kelompok yang tidak bertanggung jawab melakukan gratifikasi yang dilakukan oleh pemohon kepada Dinas terkait. Adapun respon dari pemerintah berkaitan dengan penyewaan jasa konsultan bangunan memiliki tujuan agar konstruksi bangunan yang dibuat memenuhi standar keamanan, keselamatan, Kesehatan dan berkelanjutan.

Melalui hasil keputusan panitia khusus dan perangkat Dinas berkaitan dengan kendala yang dihadapi masyarakat khususnya pada masyarakat pra Sejahtera, pemerintah memberikan keringanan yang telah dituliskan pada materi Perda Nomor 1 Tahun 2022 pada bab XI tentang keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi. Pemberian keringanan retribusi persetujuan bangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan obyek tidak lebih

dari 45 m<sup>2</sup> tidak perlu menggunakan jasa konsultan dan pengurangan retribusi paling tinggi 50 persen dari retribusi yang dibayar.

#### **5.4 Akuntabilitas**

Akuntabilitas menjelaskan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dengan melaporkan, menyajikan dan menungkapkan segala aktivitas dan kegiatan berkaitan dengan kinerja pemerintah kepada masyarakat. Untuk melihat akuntabilitas kebijakan pemerintah harus mampu memberikan jawaban sebagai bentuk tanggung jawab dengan melakukan penyebaran informasi kepada publik alasan terbentuknya suatu kebijakan publik dalam membuat keputusan dan pengambilan tindakan. Pentingnya nilai-nilai demokrasi salah satunya nilai akuntabilitas akan memberikan penilaian pada suatu kebijakan dinilai berkualitas, hal ini dikarenakan pemerintah telah mampu memberikan pertanggung jawaban pada pembentukan kebijakan publik.

Dalam penelitian analisis kualitas formulasi kebijakan daerah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung, peneliti melihat bahwa nilai akuntabilitas telah diakomodasi dengan pemerintah dapat memberikan pertanggung jawaban terkait adanya perubahan peraturan daerah retribusi persetujuan gedung menggantikan peraturan izin mendirikan gedung. Keunggulan nilai akuntabilitas sebagai salah satu nilai-nilai demokrasi memberikan penilaian pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung dinilai berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan nilai akuntabilitas, pertanggung jawaban atas latar belakang dari pemerintah daerah menjelaskan tindakan dalam perubahan peraturan daerah retribusi persetujuan bangunan gedung didasari oleh inisiatif dewan untuk melakukan pembaharuan peraturan yang berkaitan dengan peraturan bangunan gedung. Pembentukan Perda Nomor 1 Tahun 2022 dilatar belakangi dengan pemerintah daerah

melakukan revisi terkait peraturan izin mendirikan gedung namun seiring dengan berjalannya revisi pada tahun 2020 pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang berkaitan dengan penghapusan kebijakan peraturan izin mendirikan bangunan, maka perlu adanya perubahan nomenklatur Peraturan Daerah yang diusulkan agar sesuai dengan aturan terbaru tersebut di atas termasuk penyesuaian terhadap beberapa substansi materi muatannya mengingat dalam aturan terbaru dilakukan perubahan istilah Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung.

Dengan adanya perubahan retribusi persetujuan bangunan gedung menggantikan peraturan izin mendirikan bangunan pemerintah melakukan pertanggung jawaban terkait penyebaran informasi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan peraturan yang mengatur retribusi bangunan gedung, penyebaran informasi atas keberlanjutan penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2022 pada penyiaran situs radio 93, 10 Fm, perangkat Dinas terkait melakukan program gempungan, kegiatan talkshow dan pemasangan baliho di beberapa titik jalan Purwakarta.

Adapun dalam proses penyusunan rancangan Perda berlangsung yang dilakukan oleh panitia khusus dan Dinas terkait bersama perwakilan masyarakat yang dijadikan sasaran pada Perda Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah melakukan laporan terkait hasil pembahasan rancangan perda berkenaan tentang substansi materi yang akan dimuat pada rancangan perda bersama dengan anggota DPRD yang telah dibentuk menjadi panitia khusus. Laporan pertanggung jawaban atas pembahasan kegiatan rapat bersama panitia khusus dan Dinas OPD akan dibuat laporan notulensi hasil kegiatan rapat yang nantinya akan kembali dibahas bersama perwakilan masyarakat untuk dapat dicatat baik berupa masukan maupun keinginan dari setiap pihak perwakilan masyarakat. Untuk dapat menjabarkan preferensi masyarakat hasil kajian yang dilakukan oleh panitia khusus, Dinas terkait dan masyarakat pemerintah membuat naskah

akademik sebagai landasan bersifat akademis untuk dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

Dasar pertimbangan retribusi persetujuan bangunan gedung pemerintah memberikan pertanggung jawaban dengan menjelaskan bahwa rumusan formula perhitungan retribusi persetujuan bangunan gedung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang bangunan gedung. Penentuan tarif retribusi mengacu pada standar harga satuan tertinggi Tertinggi sesuai dengan penetapan besaran Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana yang nantinya dikalikan dengan Indeks Lokalitas dengan range antara 0,1% - 0,5%. yang telah dirumuskan oleh Dinas PUTR bidang tata bangunan. bangunan prasarana bangunan gedung menggunakan harga satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil kajian dan survey yang telah dilakukan Dinas Teknis terkait.

Melalui wawancara bersama seluruh informan maka dalam formulasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 dengan mengakomodasi nilai-nilai demokrasi salah satunya nilai akuntabilitas, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dapat mempertanggung jawabkan hasil dari setiap tindakan atau keputusan adanya perubahan Peraturan Daerah izin mendirikan bangunan digantikan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 melalui pemberian informasi kepada masyarakat, melakukan laporan hasil kegiatan rapat berkenaan keputusan yang diambil, serta pelaporan bulanan retribusi yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah setelah Perda Nomor 1 Tahun 2022 disahkan dan disebarluaskan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, S. Kebijakan Publik, Edisi 2, Salemba Hunaika, Jakarta, 2012
- Bjuremalm, H, Gibaja, A, Molleda, J. Akuntabilitas Demokratis Dalam Pelayanan Publik. Stockholm: IDEA International, 2014
- Box, Richard C. *Democracy and Public Administration*. New york, United States of America: M.E.Sharpe, 2007
- Creswell, J Educational Research : Planing, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative research. Fourth Edition, Pearson. 2004
- Creswell, J. Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publication, 2009
- Creswell, J. Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih diantara Lima Pendekatan , Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Dunn, W. Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, 2003, 210
- Dunn, W. *Public Policy Analysis an Integrated Approach*. six ed. New York: Reutledge, 2018
- Dye, T. R. Understanding Public Policy. *Understanding Public Policy*. (Fourteenth Edition). New Jersey: Peason Education, 2013
- Iriani, N. Metode Penelitian, Yogyakarta : Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022
- Mansur, A. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukug Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Miles M, A. Huberman, dan J. Saldana, "Qualitative Data Analysis", 1994, <http://libgen.is/book/index.php?md5=3CA7ED4E350707CE1FE1CF0C8754C315>
- Neuman, W. L. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. Seventh Edition ed. Harlow, essex: Pearson Education, 2014

- Nugroho, R. Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011
- Nugroho, R. Public Policy : Dinamika Kebijakan Publik, Analisis publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, PT Elex Media Komputindo, 2018
- Nugroho, R. Demokrasi dan Kebijakan Publik, Penerbit : Rumah Reformasi Kebijakan, 2020,
- Nugroho, R. Kebijakan Publik : Menuju Kebijakan Publik Unggul, PT Elex Media Komputindo, 2021
- Silalahi, U. Administrasi Publik Demokratis. Uwais Inspirasi Indonesia, 2021
- Silalahi, U. Metode Penelitian Sosial kuantitatif. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018
- Silalahi, U. Rachmawati, T. Wicaksono, K.W dan Herwanto, T.S. Handbook Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Administrasi Publik Bandung: UNPAR PRESS, 2017
- Taufiqurokhman. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014
- Yin, K.Robert, Studi Kasus: Desain dan Metode, terjemahan M. Djauzi Mudzakir, Jakarta: Rajawali Pers, 2021,18

## **Jurnal**

- Ariani, D, Konsep Kualitas, modul 1, [https ://Pustaka.ut.ac.id](https://Pustaka.ut.ac.id)
- Dedi, A. dan Sudarmo, U. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, Jurnal of Management Review, 2019, 2, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/managementreview>
- Handayani, P. Teknik Penelitian : Kerangka Konsep, Variabel, Definisi istilah, [https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F79234%2Fmod\\_resource%2Fcontent%2F2%2F6\\_6981\\_KMS362\\_102018.pdf](https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F79234%2Fmod_resource%2Fcontent%2F2%2F6_6981_KMS362_102018.pdf)

- Hanisa, I dan Firdaus, S. Dinamika demokrasi dalam Kebijakan Publik : Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, 2023, Vol 2 Nomor 4 <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/975/588/4575>
- Hauteas, G. Rusmiwari, S. Setiawan, D. “Hubungan Kebijakan Demokratis Dan Transparansi Legislatif Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Public Policy Excellence”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 6 No 1 <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/376/309>, 2017
- Iskandar, D. Dimensi Krusial Ruang Publik Dalam Proses Perumusan Kebijakan yang Bermakna Untuk Kebaikan Bersama, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume XXI, 2015, <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/download/231/214/927>
- Lusiati, K. Demokrasi Dalam Pemerintahan, Jurnal Studi Kepolisian, edisi 070, 2008, <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/29058-070-Jsk08-127.pdf>
- Muadi, S, Ismail dan Sofwani, A. Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik, Jurnal review politik, volume 06, nomor 02, 2016, 200, <https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/JRP/article/view/1078/1012>
- Muhammad, F. 2021. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” Kajian Kuliah Mata Umum Vol. 21. No. 1.:36. file:///C:/Users/Asus/Downloads/38075-110174-1-PB.pdf.
- Muhammad, K. Firdaus, S. dan Hasrul, M. Kebijakan Publik dan Politik Hukum : Membangun Demokrasi Berkelanjutan Untuk Masyarakat, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol 2 Nomor <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/980/5894>. 2023
- Muhammadiyah. “Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonom Daerah.” vol.III No 11 (April). file:///C:/Users/Asus/Downloads/61-124-1-SM.pdf, 2013

Nugroho, R., Membangun Kebijakan Publik Unggul di Era Demokrasi, Jurnal Academa Praja, vol 1 nomor 2 , 2018, <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/63>,

Nurasa, H. Sintaningrum dan Supraypgi, Y. Transformasi Administrasi Negara : Perspektif Politik dan Kebijakan Publik, Falsafa, <https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/003-Persepektif-Publik-dan-Kebijakan-Publik.pdf>

Prabawati. I . *Analisis Kebijakan Publik*. Vol. volume 71. UNESA UNIVERSITY PERSS. <https://library.unesa.ac.id/downloadlink/cebd4c21-793d-437c-af7f-db412fdeb3a2>, 2020

Putra. N, Rusli. Z dan Yuliani. F Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jurnal Administrasi Negara, Volume 16 Nomor 1, 2020, 108, <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/viewFile/7936/6133>

Trisakti, F, Berliana, A, Bukhori A, Fitri, A. 2021, “Transparansi dan Kepentingan Umum.” Jurnal Ilmu Sosial Volume 19 No 1:31. <https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/61/53>.

### **Internet**

Indeks Kualitas Kebijakan, Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan Pada Instansi Pemerintah, LAN

KBBI. (n.d.). Arti kata kualitas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

Diakses pada Juli 2, 2024, from <https://kbbi.web.id/kualitas>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, <https://pu.go.id/berita/tag/Purwakarta>

Panduan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan, 2023, Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Diskominfo Kabupaten Purwakarta, <https://diskominfo.purwakartakab.go.id/>

### **Dokumen Pemerintah**



BPK RI, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/257259/perda-kab-purwakarta-no-1-tahun-2022>.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Ranperda melalui Dinas PUTR

Rekapitulasi Perda RPBG melalui Kementerian Dalam Negeri

### **Wawancara**

Bapak “MJ”, wawancara oleh Darell, rekaman digital, Kabupaten Purwakarta, 10 Juli 2023

Ibu “AR”, wawancara oleh Darell, rekaman digital, Kabupaten Purwakarta, 5 Oktober 2023

Bapak “IK”, wawancara oleh Darell, rekaman digital, Kabupaten Purwakarta, 2 November 2023

Bapak “H”, wawancara oleh Darell, rekaman digital, Kabupaten Purwakarta, 12 Desember 2023

Bapak “DD”, wawancara oleh Darell, rekaman digital, Kabupaten Purwakarta, 12 Desember 2023

Ibu “M” dan Ibu “OR”, wawancara FGD oleh Darel, rekaman digital, Kabupaten Purwakarta, 3 November 2023

Bapak “IS”, wawancara oleh Darell, rekaman digital, Kabupaten Purwakarta, 12 Desember 2023

Bapak “AN” dan Ibu “LY”, wawancara FGD secara daring oleh Darell, rekaman digital Bandung, 20 Juni 2024